

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI**
**Studi di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang
Bidang Tata Bangunan Kabupaten Sidoarjo**

Shandy Octafialdo

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
shandyoctafialdo37@gmail.com

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
suprihartono@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang membuka kerja sama dalam perindustrian di dunia, tentu saja para investor dari luar negeri akan bekerja sama dengan kolega yang berada di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo ialah kabupaten terbanyak pelaku usaha/perusahaan terbanyak di Jawa Timur, pelaku usaha yang membutuhkan dokumen administratif. Peneliti ini mengetahui implementasi kebijakan peraturan bupati Sidoarjo tentang tata cara pemberian dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Fokus penelitian didasarkan pada empat model implementasi menurut Edward III dan variabel implementasi menurut Grindel. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan 5 orang sebagai informan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan peraturan bupati Sidoarjo berjalan dengan cukup baik menurut empat model implementasi dan satu variabel implementasi namun satu model implementasi belum berjalan dengan baik yaitu komunikasi dan sumber daya informasi sehingga pelaku usaha belum sepenuhnya mendapatkan informasi tentang tata cara pemberian dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Kata kunci: *Pelaku usaha, Tata cara pemberian dan perpanjangan, Sertifikat Laik Fungsi*

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu peradaban manusia selalu berkembang mulai dari pola hidup, gaya hidup, maupun bangunan gedung dari zaman ke zaman, tidak dapat dipungkiri bangunan gedung mulai bermunculan dari yang kecil maupun yang besar. Bangunan gedung merupakan bagian yang sangat penting dalam

kehidupan manusia, bangunan gedung sendiri diperuntukan sebagai tempat beraktifitas mulai dari fungsi hunian, sosial, budaya dan usaha.

Di Indonesia sendiri bangunan gedung juga banyak bermunculan mulai di berbagai tempat mulai dari tingkat desa maupun tingkat kota, bangunan gedung tersebut dapat dimanfaatkan mulai dari sekolah, tempat keagamaan, hunian, maupun dijadikan usaha atau perusahaan Berdasarkan pada kegiatan Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016) mengenai usaha atau perusahaan yang bergerak di berbagai usaha diluar aktivitas usaha pertanian berjumlah 26,7 juta usaha atau perusahaan di Indonesia. Dibandingkan dari tahun 2006 yang berjumlah 22,7 juta usaha atau perusahaan. Sebaran usaha atau perusahaan di pulau Jawa mencapai 60,72 persen di Indonesia yang meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur dari hasil SE2016 jumlah usaha/perusahaan di Kabupaten Sidoarjo memiliki 206.934 tercatat di Tahun 2016, angka ini meningkat 18,56 persen di bandingkan SE2006 dengan 174.528 jumlah usaha/perusahaan. Berdasarkan hasil *listing* Sensus Ekonomi 2016 di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.261 usaha atau perusahaan. Para usaha atau perusahaan tidak serta merta melakukan melakukan aktifitas usahanya melainkan juga membutuhkan peraturan yang mengatur segala kebutuhan usahanya maupun persyaratan administratif lainnya.

Kebijakan dari masing-masing daerah diperlukan agar bangunan gedung yang dihasilkan dan digunakan merupakan bangunan layak yang sesuai dengan fungsinya, dapat diandalkan, serta cocok dengan kondisi daerah tersebut. Dengan melihat hal tersebut, maka kebijakan tentang bangunan gedung pada masing-masing daerah haruslah memperhitungkan kondisi dari lingkup daerah yang diaturnya. Persyaratan administratif bangunan gedung memerlukan beberapa persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan dan IMB. Para pelaku usaha dalam menyelenggaraan bangunan gedung perlu di atur dan dibina demi bangunan gedung laik bagi manusia yang berada di bangunan gedung tersebut. Para pelaku usaha atau perusahaan tentu saja menginginkan pemenuhan persyaratan administratif bangunan gedung perusahaan milik mereka maka pemerintah sidoarjo mengeluarkan kebijakan yang mengatur hal tersebut.

Dinas Perumahan Permukiman Cipta karya dan Tata Ruang bidang Tata Bangunan kabupaten Sidoarjo sebagai implementor peraturan yang telah di tetapkan oleh peraturan bupati Sidoarjo. Pada struktur dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Bangunan melayani berbagai pelayanan salah satunya adalah pelayanan pemberian dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi atau yang biasanya disingkat SLF Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Sertifikat Laik fungsi (SLF) bertujuan untuk kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kenyamanan, serta kemudahan bangunan gedung. Penghuni ataupun tamu merasa aman terhadap bangunan gedung itu dikarenakan sudah ditinjau oleh tim ahli bangunan gedung.

Para pelaku usaha atau perusahaan di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat beberapa bangunan gedung perusahaan yang belum memiliki Sertifikat Laik

Fungsi Bangunan Gedung, oleh sebab itu bupati sidoarjo menerbitkan sebuah kebijakan menindak lanjuti dari peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung pemerintah kabupaten sidoarjo menerbitkan peraturan Bupati Sidoarjo Tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung. Isi dari kebijakan peraturan Bupati Sidoarjo yaitu persyaratan administratif yang di perlukan dalam penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kabupaten Sidoarjo.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan masalah secara sistematis melalui proses pengumpulan data dari narasumber dan kemudian dianalisis, sehingga dapat dengan jelas memahami objek penelitian dan kemudian menarik kesimpulan.

Fokus dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Cipta Karya Tata Bangunan Kabupaten Sidoarjo dalam pemberian dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung salah satunya bangunan gedung bagi perusahaan yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

Lokasi penelitian dilakukan pada area Dinas Perumahan dan Permukiman Cipta Karya Tata Bangunan Kabupaten Sidoarjo yang terletak Jl. Ahmad Yani, Pucang, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61219.

Berapa macam sumber yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer peneliti melakukan wawancara dan observasi. Untuk data primer peneliti melakukan pengumpulan arsip-arsip yang terdapat di tata bangunan.

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teknik analisis data guna menyelesaikan permasalahan. Proses kegiatan analisis yaitu Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan bupati Sidoarjo peneliti menggunakan 4 model implementasi kebijakan menurut Edward III dan variabel implementasi menurut grindel yaitu lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Model implementasi menurut Edward III

a. Komunikasi

Pegawai bagaimana memberikan informasi terhadap masyarakat yang sebagai sasaran sebuah kebijakan yang ditentukan tersebut agar kebijakan sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Dalam hal ini Bidang Tata Bangunan telah melakukan pemberian dan perpanjangan SLF kepada pemohon di Kabupaten Sidoarjo. Akan memberikan sosialisasi secepatnya kepada pelaku usaha. Pemberian dan perpanjangan SLF Bangunan Gedung yang lakukan oleh Bidang Tata Bangunan memalui salah satu seksinya perencanaan teknis gedung pemerintahan telah memberikan informasi terkait SLF. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tersebut berfokus pada pemenuhan adminsitratif bangunan gedung.

b. Sumber Daya

Dalam penelitian ini sumber daya ini adalah sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan peraturan bupati Sidoarjo, Bidang Tata Bangunan melalui pegawai tidak memiliki spesifikasi atau klasifikasi dalam pemberian dan perpanjangan SLF Bangun Gedung. Pegawai bekerja sama dengan jasa kontruksi Bangunan Gedung. Sumber daya Sarana dan prasana untuk menunjang implementasi di Bidang Tata Bangunan dari segi sarana dan prasana cukup baik tetapi peneliti selama observasi tidak terlihat brosur yang sebagai saran menginformasikan syarat-syarat dokumen administratif apa saja yang di butuhkan oleh pelaku usaha / pemohon yang seharusnya di tempatkan pada *front office* agar mudah dijangkau pemohon untuk pegangan, sedangkan sarana lainnya yaitu *standing banner* peneliti tidak menemukan *standing banner* tersebut setelah menanyakan kepada kepala bidang maupun pegawai selalu menjawab ada di ruang tunggu, dalam kenyataan *standing banner* diletakan di ujung ruangan tunggu yang tertumpuk oleh *standing banner* lainnya sehingga tidak terlihat oleh peneliti maupun pemohon yang berada di ruangan Tata Bangunan.

c. Disposisi

Sikap para implementor dalam kesuaian penerbitan dalam pelaksanaan pemberian dan perpanjangan SLF Bangunan Gedung. peneliti menarik kesimpulan bahwa sikap implementor sudah tepat dalam memberikan informasi karena seluruh implementor yang melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan SOP pemberian dan perpanjangan SLF

d. Struktur Birokrasi

Bidang Tata Bangunan ini memiliki struktur kepala bidang lalu tugas dilanjutkan kepada seksi dan seksi di perbantukan oleh staf. Ada beberapa tugas yang mencakupi bidang tata bangunan ini salah satunya ialah penerbitan dan perpanjangan SLF ini. Seksi yang di tugaskan untuk menangani Sertifikat Laik Fungsi ialah seksi perencanaan teknis bangunan umum, selama penelitian ini penelitian tidak melihat seksi tersebut yang mengerjakan atau di tugaskan oleh kepala bidang tata bangunan ini melaikan seksi perencanaan teknis gedung pemerintah yang dibantu oleh staf seksi perencanaan teknis bangunan gedung.

Variabel implementasi menurut grindel:

Lingkungan implementasi (*context of implementation*)

a. Kekuasaan, Kepentingan, Strategi Aktor yang terlibat

DP2CKTR Bidang Tata Bangunan ini memiliki kekuasaan dalam pemberian dan perpanjangan SLF Bangunan Gedung yang dimana pemohon yang kurang lengkap dalam administratif, Bidang Tata bangunan tidak mengeluarkan SLF Bangunan Gedung yang diajukan. Kepentingan dalam implementasi ini pegawai DP2CKTR Bidang Tata Bangunan menjalankan kepentingan di dalam isi kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakter bidang Tata Bangunan dalam memberikan pelayanan informasi terkait pemberian dan perpanjangan SLF cukup baik sehingga dapat menjalankan kebijakan selaras dengan tujuan kebijakan bupati Sidoarjo.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan pegawai DP2CKTR ini dalam kebijakan bupati Sidoarjo sudah baik, observasi dalam penelitian pegawai DP2CKTR ini patuh dalam memberikan informasi persyaratan administratif dikarenakan memiliki SOP dalam memberikan informasi terkait syarat administratif dan alur.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti uraikan di bab IV. Berikut peneliti simpulkan hasil peneliti terkait Kebijakan pemberian dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung sendiri menggunakan variabel implementasi dari Grindle dan didukung dengan model implementasi dari Edward III. Model implementasi menurut Edward III :

a. Komunikasi

Cukup baik, pemohon bekerja sama dengan jasa konstruksi bangunan gedung, jasa konstruksi berkomunikasi dengan tata bangunan

b. Sumber Daya

Cukup baik, namun dari segi sarana dan prasarana masih kurang di pelihara

c. Disposisi

Sudah sesuai dengan SOP yang telah di tentukan dan dilaksanakan dengan baik

d. Struktur Birokrasi

Cukup baik dikarenakan diahli tugas sementara terhadap seksi perencanaan teknis gedung pemerintah selagi masih belum ada penggantinya

Variabel Grindel

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Memiliki kepentingan menjalankan kebijakan pemberian dan perpanjangan SLF Bangunan Gedung ini berjalan dengan baik.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Cukup baik dalam menyampaikan informasi terkait pemberian dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Cukup patuh dikarenakan semua tugas berpegang dengan SOP yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Rian Nugroho. (2018). *Public policy (dinamika kebijakan publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik)* PT. Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia).
- J. Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Lutfi, M., & Syaifullah, B. N. (2020). Analisis Kelayakan Bangunan Gedung Pasar Sukarsari Bogor Melalui Pendekatan Laik Fungsi Bangunan. *Astonjadro*, 9(1), 14. <http://doi.org/10.32832/astonjodro.v9i1.2726>